

*Pancasila dan Implementasi Pancasila
dalam Bidang Ekonomi*

Edy Suandi Hamid, .

The background of the lower half of the slide is a blurred image of several Indonesian Rupiah banknotes. The colors of the notes are muted, showing shades of blue, green, and purple. The focus is soft, making the details of the currency less distinct but clearly recognizable as money.

Mukadimah

*Pancasila adalah asas kultural, asas religius, dan asas kenegaraan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berjiwa Pancasila, batin dan lahir, dalam seluruh hidupnya termasuk yang bersifat sosial-ekonomi (kenegaraan) (Notonagoro, 1959)

aa

*"... Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua." Dan pula: ..."
"Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong." (Bung Karno dalam Pancasila 1 Juni 1945)*

*Di atas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya" (Hatta, 1932)



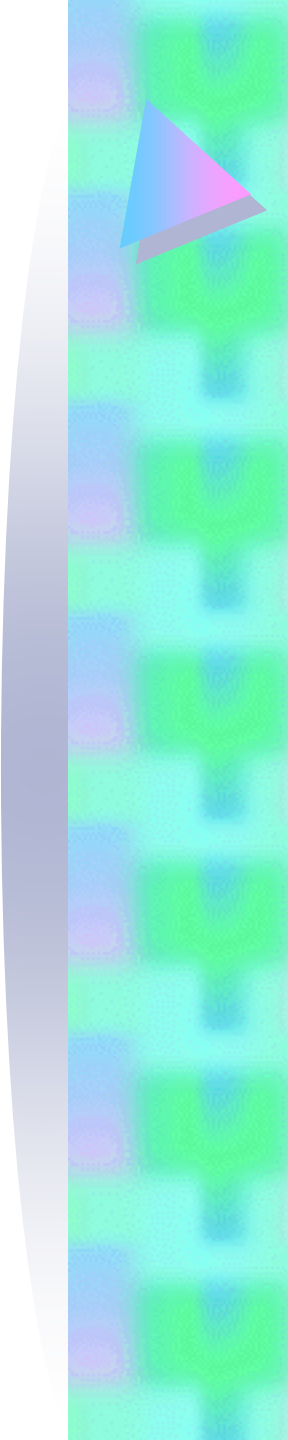
Ekonomi Pancasila

- **SE berdasar sila-sila yang ada pada Pancasila**
- **Pancasila: nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia → menjadi falsafah hidup Bangsa → menjadi ideologi Bangsa**



Ekonomi Pancasila

- **Ideologi berkaitan dengan sistem ekonomi**
- **Ideologi Pancasila → sistem ekonomi Pancasila**

- 
- **Bung Karno dan Bung Hatta, secara substantif ssejak zaman pergerakan mensitir tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi**
 - **Namun eksplisit baru dikemukakan oleh Prof Emil Salim (1967) dan (1979)**



Gagasan SEP

- **Prof Mubyarto → P4**
- **Mendorongnya menggali lebih dalam tentang SEP**
- **Seminar-seminar EPS 1980**
- **Tim Pengkajian Dikti**
- **Pustep (2001)**
- **Pustek**

- 
- **PPSEP berkembang di beberapa uNiversitas**



Kontekstualisasi dan Implementasi

- Harus dapat diberikan tafsir/interpretasi dalam berbagai bidang → bidang ekonomi!
- Ini terus dikembangkan dengan prinsip dasar yg tetap namun terbuka untuk interpretasi yang kontekstual sejalan berkembangnya peradaban



Intrepretasi Ekonomi: Mubyarto

- Beruntung dalam bidang ekonomi kita mempunyai seorang ekonom yg sampai akhir hayatnya tekun mengkaji tentang Ekonomi Pancasila ini dan meninggalkan "dokumen" berupa makalah seminar, tulisan di media cetak, dan publikasi buku yang demikian banyak mengenai topik tersebut, di samping "mewariskan" Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM:
Almarhum Prof. Mubyarto

Ekonomi alternatif

- Kita terbelenggu ilmu ekonomi yang mengajarkan keserakahan → untuk meluruskan ekonomi kita perlu kembali ke perilaku ekonomi berdasar nilai Pancasila

Ini bukan suatu yg mengada-ada → sejak 1980an meningkat → pencarian IE alternatif



Ekonomi alternatif

- Gugatan thdp ek konvensional: Muncul pemikiran ekonomi alternatif, seperti Ek. Kelembagaan (*Kenneth Boulding*), Ek. Strukturalis (*Raul Prebisch*), serta Ek Islami yang digali ekonom-ekonom muslim.
- Gugatan senada juga dilontarkan Paul Ormerod (*The Death of Economics*), Steve Keen (*Debunking Economics*), Stiglitz (*The Roaring Nineties*), Paul Ekins (*Real-Life Economics*), Nelson (*Economics as Religion*), dan dapat pula dirujuk pemikiran Gunnar Myrdal, Heilbroner, Amartya Sen, T.M. Lunati, A. Etzioni, Umer Capra, Ted Trainer, & L.C. Thurow.



Ekonomi alternatif

- Di Universitas Harvard ditawarkan pengantar ekonomi alternatif yang diajar *Prof Martien Feldstein* (penasihat ekonomi Presiden AS Reagan). Asumsi dasar berbeda dengan ekonom neo-klasik, menolak konsep *homo-ekonomikus*, yang selalu menganggap manusia bertindak rasional. Ini merupakan serangan yang mendasar pada ajaran ekonomi konvensional



Pancasila: falsafah hidup

- Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa yang berisikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia → termasuk dalam berekonomi.
- Merupakan fondasi utama bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yang menjadi pedoman hidup bagi suku dan beragam ras yang ada di negeri ini, yang menjadi sumber perekat untuk hidup dalam harmoni satu dengan lainnya.



Ekonomi Pancasila

- Dengan menempatkan Pancasila sbg falsafah hidup Bangsa maka maka pola berekonomi masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai falsafah hidup itu → Ekonomi Pancasila.
- Ekonomi Pancasila, secara sederhana, dapat dikatakan sebagai ekonomi yang berke-Tuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang nasionalistis, *ekonomi yang berkerakyatan*, dan ekonomi yang berkeadilan.



Ekonomi Pancasila

- Sistem Ekonomi yang khas (berjati-diri) Indonesia, yang digali dan dikembangkan berdasar kehidupan ekonomi riil (*real-life economy*) rakyat Indonesia.
- berpijak pada kombinasi antara gagasan-gagasan normatif dan fakta-fakta empirik yang telah dirumuskan oleh *founding fathers* bangsa dalam wujud sila-sila dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal (ekonomi) UUD 1945 (asli), yaitu pasal 27 (ayat 2), 31, 33, dan 34



Ekonomi Pancasila

- Nilai2 EPS dikaitkan dgn tujuan nasional terelaborasi dlm Pembukaan UUD 45 → yg dalam konteks ekonomi dapat dikatakan sbg ekonomi kebangsaan kita.
- Ekonomi berwawasan kebangsaan mewujudkan manakala, perekonomian sebagai sebuah sistem kehidupan bangsa mampu diarahkan untuk: 1) melindungi kepentingan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) melaksanakan ketertiban dunia.



Ekonomi kerakyatan

- Ekonomi yang mengedepankan aktivitas dalam perekonomian melibatkan sebagian besar rakyat.
- Rakyat dianjurkan, diajak, dan didorong memproduksi; mendistribusikan produknya ke sebagian besar rakyat tsb, dan menikmati produk yang tersedia secara manusiawi dan adil

Prinsip Penerapan Ekonomi Pancasila

- 1. roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.**
- 2. ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.**
- 3. semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri.**



Prinsip Penerapan Ekonomi Pancasila

- 4. demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan: koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.**
- 5. keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Ekonomi Pancasila sebagai Perlawanan terhadap Ekonomi Liberal

- Pengembangan ekonomi Pancasila didorong meluasnya pemikiran dan praktek-praktek neoliberalisme (neolib) di berbagai sendi-sendi kehidupan berekonomi nasional
- Neoliberalisme sudah berlangsung di Indonesia sebelum Friedrich von Hayek dan Milton Friedman mengkampanyekannya mulai tahun 1970/80-an dari Universitas Chicago, sebelum dipraktekkan Thatcher (*Tatcherism*) dan Reagan (*Reaganomics*) di Inggris dan Amerika

Praktek Ekonomi Liberal di Indonesia

- ditandai penetrasi dan dominasi modal internasional (perusahaan asing) atas faktor produksi dan pasar komoditi, yang bermula pasca Politik Etik untuk merevisi sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) pada tahun 1830-1870.
- Sementara, liberalisme baru (neolib), dengan kondisi yang hampir serupa, sudah berlangsung sejak naiknya rezim Orde Baru dibarengi dengan penetrasi modal internasional (MNCs) untuk menguasai berbagai basis produksi strategis di Indonesia



Praktek Ekonomi Liberal di Indonesia (John Pilger, *The New Rulers of The World*, 2002)

- **Konperensi Jenewa (Swiss) pada tahun 1967 yang disponsori oleh Time-Life Corporation**
- **Konperensi yang disebutnya sebagai “pertemuan merancang pengambilalihan Indonesia” itu diikuti oleh korporat raksasa Barat dan ekonom-ekonom top Indonesia yang dikenal sebagai “Berkeley Mafia”**
- **Konperensi 3 hari itu kemudian berbuah “kaplingisasi” kekayaan alam di Indonesia oleh jaringan modal internasional.**
- - **Freeport => gunung tembaga di Papua Barat,**
 - **Konsorsium Eropa => nikel di Papua Barat,**
 - **Alcoa => menerima bagian terbesar bauksit di Indonesia, dan**
 - **kelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan.**



Praktek Ekonomi Liberal di Indonesia (John Pilger, *The New Rulers of The World*, 2002)

- Dalam kurun waktu 1971-1980, tim Perkins telah “menjerumuskan” beberapa negara Asia dan Amerika Selatan seperti Panama, Equador, Colombia, Iran, termasuk Indonesia (sebagai “korban pertamanya”), dalam kubangan (jebakan) utang luar negeri dan ketergantungan politik-ekonomi kepada korporat dan pemerintah AS.
- Perkins yang berpredikat sebagai “perusak ekonomi” atau “*Economic Hit Man*” (EHM), mengemban dua misi, yaitu
 - memastikan bahwa utang luar negeri yang diberikan kepada Indonesia digunakan untuk membiayai proyek-proyek konstruksi raksasa milik perusahaan konsultan Perkins dan korporat-korporat AS, dan
 - “membangkrutkan” ekonomi Indonesia agar selamanya tunduk pada kreditor



Praktek Ekonomi Liberal dan Ketidakadilan

- **Sritua Arief (2000) => setiap US \$ 1 modal asing, *net tranfer revenue* yang disedot ke luar negeri adalah sepuluh kali lipatnya (US 10\$).**
- **Mubyarto (2005) => rasio konsumsi per kapita dengan PDRB per kapita menunjukkan fakta “derajat penghisapan” ekonomi Indonesia sebesar 57%.**
 - Artinya, hanya 43% nilai PDRB yang dinikmati rakyat di daerah, selebihnya “dihisap” ke kota-kota besar dan dibawa ke luar negeri.



Praktek Ekonomi Liberal dan Ketidakadilan

- kemiskinan struktural disertai peminggiran (marginalisasi) peran ekonomi rakyat dalam aktivitas perekonomian nasional dan bahkan diikuti dengan bencana kelaparan, gizi buruk, dan banyaknya anak putus sekolah.
- ketidakadilan dan ketimpangan itu telah membuat kaum miskin makin tak berdaya, sehingga terpaksa harus kembali mengalami nasib seperti di era kolonialisme.
- kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah pasca reformasi pun tidak menyentuh pada akar masalah struktural di atas, karena dibangun dalam suasana keterjajahan ekonomi dan dominasi neoliberal, tanpa kesadaran yang cukup untuk terbebas darinya



Praktek Ekonomi Liberal dan Ketidakadilan

- **Struktur imperialistik berimbas pada konstruksi kebijakan ekonomi hingga kini yang lebih menguntungkan kepentingan agen-agen neolib, khususnya modal internasional**
- **Marjinalisasi peran negara, yang sudah lebih dulu dilakukan terhadap peran ekonomi rakyat, dilakukan melalui desakan penghapusan subsidi untuk kepentingan publik**
- **Muara neolib adalah beralihnya tampuk produksi dari negara ke korporat, sama sekali bukan ke rakyat banyak (masyarakat)**



Pilar Ekonomi Pancasila

meliputi:

- a. ekonomika etik dan ekonomika humanistik (dasar),
- b. nasionalisme ekonomi & demokrasi ekonomi (cara/metode operasionalisasi), dan
- c. ekonomi berkeadilan sosial (tujuan).



Pilar Ekonomi Pancasila

1. Ekonomi Etik (Ketuhanan)

- “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”.
 - *founding fathers* merumuskan ‘politik kemakmuran’, ‘keadilan sosial’, dan ‘pembangunan karakter’ (*character building*) bangsa yang dilandasi semangat penerapan ajaran moral dan agama.
 - pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa, dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah, tidak sekedar pembangunan materiil semata.
 - moral ekonomi rakyat yang tidak sekedar mencari untung, melainkan memperkuat silaturahmi, menegakkan hukum-hukum Allah, dan memperhatikan kepentingan sosial.



Pilar Ekonomi Pancasila

1. Ekonomi Etik (Ketuhanan)

- menegaskan perlunya ‘revolusi moral ekonomi’ menuju pengejawantahan *platform* Sistem Ekonomi Pancasila, yang bermoral dan tidak sekuler.
- ditempuh melalui upaya-upaya serius dan konsisten untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek ekonomi yang mengabaikan nilai moral dan sosial seperti
 - korupsi, penyelewengan pajak, *illegal logging*, penyelundupan, perjudian, dan semacamnya.



Pilar Ekonomi Pancasila

2. Ekonomi Humanistik (Kemanusiaan)

- “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.
 - tertuang dalam bagian penjelasan Pasal 33 UUD 45 (sebelum diamandemen) dalam konsep ‘kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang’.
 - Sampai saat ini masih sulit meyakini realisasi semangat tersebut karena setiap upaya ‘memakmurkan ekonomi’ ternyata yang lebih merasakan dampaknya tetap saja ‘orang besar’ baik pengusaha ataupun pejabat pemerintahan



Pilar Ekonomi Pancasila

2. Ekonomi Humanistik (Kemanusiaan)

- ketimpangan sosial-ekonomi susah untuk diperkecil. Di puncak piramida yang menguasai mayoritas kue nasional dihuni segelintir pelaku ekonomi. Sebaliknya, di dasar piramida yang kuenya kecil diperebutkan puluhan juta orang.
- Ekonomika humanistik berfungsi sebagai *platform* ekonomi yang memperjuangkan pemerataan dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya ‘redistribusi pendapatan, aset, dan kekayaan.
- Hal ini ditempuh melalui optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat dan pajak, dan instrumen-instrumen redistribusi pendapatan lainnya.



Pilar Ekonomi Pancasila

3. Nasionalisme Ekonomi (Persatuan)

- “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.
 - sejalan dengan konsep *founding fathers* kita, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, perihal ‘politik-ekonomi berdikari’ yang bersendikan usaha mandiri (*self-help*), percaya diri (*self reliance*), dan pilihan kebijakan luar negeri bebas-aktif



Pilar Ekonomi Pancasila

3. Nasionalisme Ekonomi (Persatuan)

- **Kemandirian bukan saja menjadi cita-cita akhir pembangunan nasional, melainkan juga prinsip yang menjiwai setiap proses pembangunan itu sendiri.**
- **pembangunan ekonomi haruslah didasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya mencapai ‘nilai tambah ekonomi’ melainkan juga ‘nilai tambah sosial-kultural’, yaitu peningkatan martabat dan kemandirian bangsa**



Pilar Ekonomi Pancasila

4. Demokrasi Ekonomi (Ekonomi Kerakyatan)

- “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai prilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”.
 - Prinsip ini dijiwai oleh semangat Pasal 33 UUD 1945 yang kini sudah berganti menjadi UUD 2002 (amandemen keempat).
 - Perubahan ini telah menghilangkan seluruh penjelasan UUD 1945 termasuk penjelasan Pasal 33 yang berisikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan landasan konstitusional koperasi.



Pilar Ekonomi Pancasila

4. Demokrasi Ekonomi (Ekonomi Kerakyatan)

- Dengan *platform* ini kita berusaha keras untuk mengembalikan hakekat demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan dengan ciri ‘produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat’.
- Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat (koperasi) dalam pemilikan faktor-faktor produksi dan partisipasi luas mereka dalam proses-proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional.
- Dalam hal ini termasuk peningkatan peranan pekerja dalam kepemilikan saham dan pengambilan keputusan perusahaan.



Pilar Ekonomi Pancasila

5. Ekonomi Berkeadilan Sosial

- “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
 - Tujuan keadilan sosial juga mencakup keadilan antar wilayah (daerah), yang memungkinkan seluruh wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing.



Pilar Ekonomi Pancasila

5. Ekonomi Berkeadilan Sosial

- Oleh karena itu pengalaman pahit sentralisasi politik-ekonomi era Orde Baru dapat kita jadikan pelajaran untuk menyusun strategi pembangunan nasional.
- Inilah substansi Negara Kesatuan yang tidak membiarkan terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi antardaerah melalui pemusatan aktivitas ekonomi oleh pemerintah pusat, dan di pusat pemerintahan.
- Paradigma yang kemudian dibangun adalah pembangunan Indonesia, bukannya pembangunan *di* Indonesia seperti yang dilakukan Orde Baru dengan paham *developmentalism* yang netral visi dan misi



Bagaimana Realitasnya?

- masalah keadilan dan kesejahteraan dapat dilihat dengan mudah dari tingginya angka kemiskinan
- Perkembangan GDP?
- Neraca Pembayaran Internasional?
- Stabilitas moneter; inflasi; nilai tukar?
- Ketimpangan?
- Pengangguran?
- Impor pangan?
- Akses masyarakat ke perbankan?
- Kebijakan ekonomi?



Realitasnya?

- **Eksplorasi SDA yg berpihak pada pemodal**
- **Utang Luar Negeri dan Dalam sd 2013 mencapai R p. 2.023,72 Triliun (RAPBN Perubahan 2013 sebesar Rp 390 triliun).**
- **Ketahanan Ekonomi melemah: impor pangan?**
- **Ekonomi biaya tinggi: Pungli/Korupsi**
- **Pengangguran dan setengah menganggur masih meluas**



Realitas (Situasi Sekarang?)

- **Kemiskinan tinggi → Maret 2012, 11,96 % penduduk (29,13 jt) hidup di bawah garis kemiskinan → Artinya sejumlah besar SDA yang kita miliki tidak mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi puluhan juta penduduk.**
- **Ketimpangan melebar → Tingkat *Indeks Gini* meningkat dari waktu ke waktu yang menggambarkan semakin timpangnya pembagian pendapatan.**
 - 2005 Gini Ratio masih level 0,32, naik pada level 0,37 pada 2008, meningkat lagi menjadi 0,41% pada 2011 dan 2012. Ini merupakan angka kesenjangan tertinggi sejak tahun 1966 sampai sekarang.



Realitas (situasi sekarang)?

- Situasi global mengarah “globalisasi ekonomi”, yang lebih pada penyeragaman ideologi dan sistem ekonomi dunia (baca: kapitalis) yang ditafsirkan sesuai dengan kepentingan yang bersifat menguntungkan satu pihak (umumnya negara maju).
- Ideologi pasar bebas global dipaksakan untuk diterima oleh semua negara, yang sebagian besar masih belum siap untuk bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi yang secara empirik telah berpengalaman & melakukannya sejak berabad lalu.



Mengapa?

- Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa nilai-nilai Pancasila yang jelas-jelas tidak menanamkan nafsu keserakahan, anti-ketidakdilan dan anti-kesenjangan tidak diimplementasikan oleh mereka-mereka yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan tersebut? Bagaimana Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, termasuk sebagai filsafat ekonomi, mampu menjawab persoalan-persoalan ekonomi demikian?

Mengapa?

- Pengalaman masa lalu.
 - Rendahnya upaya dan kemamuan utk menafsirkan Pancasila dlm bidang ekonomi → kiblak ke kapitalisme
 - Tidak ada keteladanan
 - Kebijakan pemerintah sdr menyimpangi Pancasila
 - Social punishment & law enforcement yg rendah
- *PS baru sebatas mempengaruhi pola perasaan (pattern of feeling) dan pola pikir (pattern of thinking), tetapi belum sampai ke perilaku kesehariannya atau pola tindakannya (pattern of action)

Langkah?

- Perlu digalakkan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan keteladanan
- Perlu dimunculkan gerakan penyadaran agar ilmu ekonomi ini dikembangkan ke arah ekonomi yg humanistik, bukan sebaliknya mengajarkan keserakahan & mendorong persaingan yang saling mematikan utk memuaskan kepentingan sendiri → Ini dilakukan guna mengimbangi ajaran yg mengedepankan kepentingan pribadi, yang melahirkan manusia sebagai manusia ekonomi (*homo ekonomikus*), telah melepaskan manusia dari fitrahnya sebagai makhluk sosial (*homo socius*) dan makhluk beretika (*homo ethicus*).

Langkah?

- Berkaitan kebijakan ekonomi yang “diduga” menyimpangi nilai2 Pancasila, apakah bisa diberi sanksi hukum atau hanya sanksi moral?
- Apakah penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan dapat diuji oleh lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), MA, atau otoritas lainnya?
- Harus pro-aktif mencermati kebijakan publik dalam bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikaitkan dengan kesesuaiannya dengan Pancasila.
 - Adalah naif mengharapkan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat luas jika keb pemerintah & petinggi negara sendiri menyimpanginya. Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari penegakan perundangan yang berlaku, yang juga bersumber dari Pancasila tersebut!!

Harapan Alm Prof. Mubyarto (2004:26)



- "Pakar-pakar ekonomi perlu menyadari tantangan besar krisis ilmu ekonomi yang kini dihadapi Indonesia. Kita harus bekerja keras, dan lebih banyak lagi mengadakan kajian-kajian yang dapat menghasilkan gagasan-gagasan bagi pengembangan ilmu ekonomi baru di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi kita. Ilmu ekonomi baru ini disebut Ilmu Ekonomi Pancasila, yaitu ilmu ekonomi pasar yang taat mematuhi 'jiwa' kelima asas Pancasila, dan setia pada filsafat Pancasila secara utuh yaitu kekeluargaan dan gotong royong

Terima Kasih Sampai Jumpa...

